

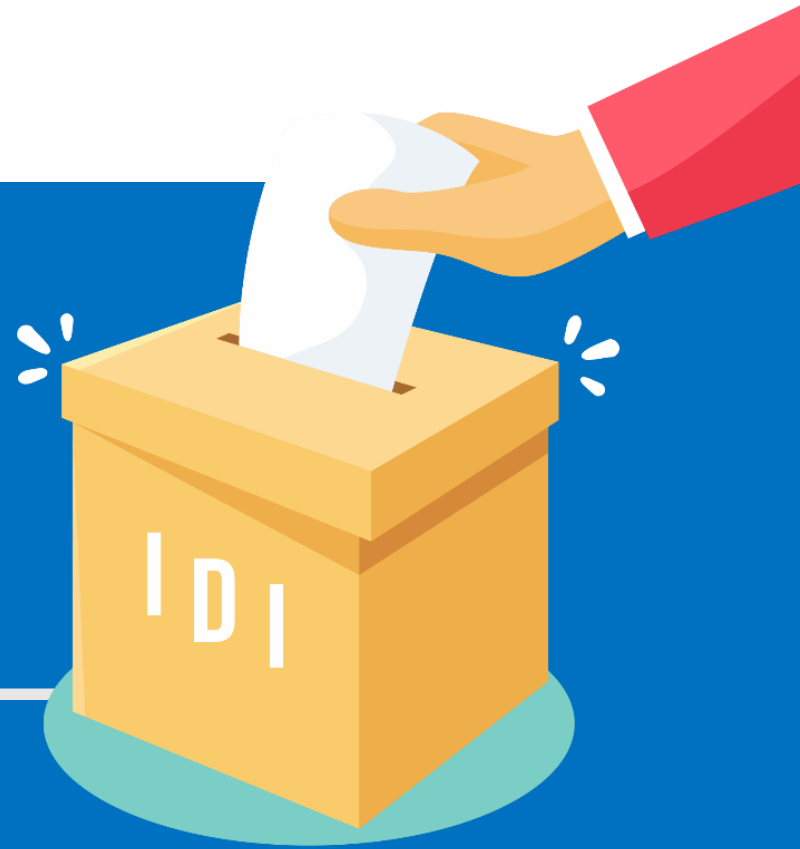


**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**



MODUL INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

SEKILAS INDEKS DEMOKRASI INDONESIA



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

IDI merupakan hasil kerja sama sejak tahun 2009 antara:



Badan Pusat Statistik (BPS)



**Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
(KEMENKOPOLHUKAM)**



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)




Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)





IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia



IDI adalah *Fact-Based Information*, bagian dari upaya mengembangkan *a culture of evidence-based decision making*, yang sesuai deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008



Setiap angka IDI mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan



IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan: kuantitatif (*reviews* surat kabar dan dokumen) dan kualitatif (FGD dan WM).



DATA IDI

Data yang dikumpulkan dalam IDI adalah kumpulan kejadian/fakta lapangan.

IDI **tidak pernah** mengumpulkan berbagai komentar, persepsi, pendapat, argumen, ataupun analisis dari siapapun, meskipun mereka adalah para pakar, ahli, pejabat, ataupun orang-orang tertentu yang ditokohkan.



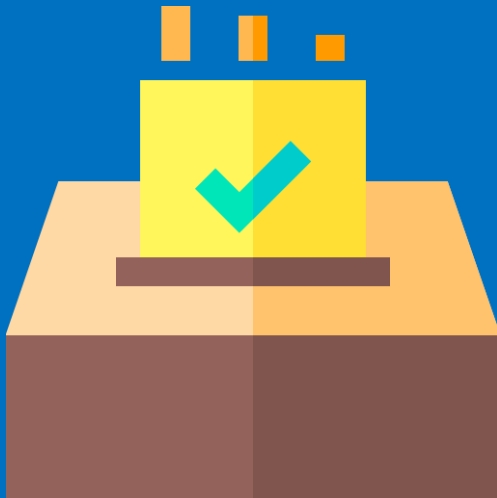
CAKUPAN WILAYAH

Pengumpulan data IDI dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Seluruh kejadian yang dikumpulkan **harus** terjadi di wilayah provinsi masing-masing.



PERIODE WAKTU KEJADIAN

Seluruh fakta/kejadian terkait indikator IDI **harus** terjadi dalam periode waktu 1 Januari hingga 31 Desember tahun **n**.



KOMPONEN IDI TERDIRI ATAS 3 ASPEK, 11 VARIABEL, DAN 28 INDIKATOR

| ASPEK | VARIABEL | INDIKATOR |
|---|--|-------------|
| Kebebasan Sipil  | 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat | 2 indikator |
| | 2. Kebebasan Berpendapat | 2 indikator |
| | 3. Kebebasan Berkeyakinan | 3 indikator |
| | 4. Kebebasan dari Diskriminasi | 3 indikator |
| Hak-Hak Politik  | 5. Hak Memilih dan Dipilih | 5 indikator |
| | 6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan | 2 indikator |
| Lembaga Demokrasi  | 7. Pemilu yang Bebas dan Adil | 2 indikator |
| | 8. Peran DPRD | 3 indikator |
| | 9. Peran Partai Politik | 2 indikator |
| | 10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah | 2 indikator |
| | 11. Peradilan yang Independen | 2 indikator |

Dokumen

Berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, dsb



Surat Kabar

Satu per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas

Focus Group Discussion (FGD)

Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari *stakeholder*



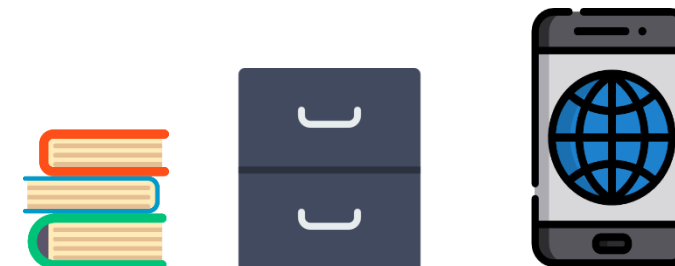
Wawancara Mendalam (WM)

Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber/ahli



Big Data

Verifikasi fakta yang diperoleh dari FGD dan WM dengan portal berita online



ALUR KEGIATAN IDI

